



Problematika Oligarki, Korupsi, dan Relasi Kuasa Dalam Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Adi Fauzanto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Adifauzan06@gmail.com

Abstrak

Kerusakan lingkungan semakin terasa dampaknya, tetapi di balik kerusakan lingkungan tersebut, terdapat penyebab dan tidak bisa terjadi begitu saja. Oligarki, korupsi, dan hubungan kekuasaan para aktor di dalamnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya di pertambangan batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menarik untuk membahas ketiganya, dan menjadi metode untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, penulis membahas ketiganya dengan pendekatan teori oligarki oleh Jeffry Winters, korupsi politik oleh Altidjo Alkostar, dan hubungan kekuasaan aktor oleh Bryant dan Bailey. Dilingkup pembahasan oligarki, penulis menjelaskan pengertian oligarki dan melacak oligark dengan cara mengidentifikasi cara kerja nya. Di pembahasan korupsi, penulis menjelaskan studi kasus korupsi PLTU Riau-1 yang merujuk kepada korupsi politik dan ancaman korupsi batu bara berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW). Di pembahasan relasi kuasa, penulis menjelaskan aktor-aktor yang terlibat beserta peran nya dalam kerusakan lingkungan, dan menjadikan metode untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan. Ketiga kajian tersebut (oligarki; korupsi; relasi kuasa) diperlukan dalam mengatasi problematika kerusakan lingkungan yang terjadi khususnya pada sektor pertambangan batu bara dan PLTU.

Kata kunci: Batu Bara, Korupsi, Oligarki, PLTU, Relasi Kuasa

Abstract

The environmental damage is increasingly felt the impact, but behind the environmental damage, there are causes and cannot just happen. Oligarchy, corruption and the power relations of the actors in it are factors that cause environmental damage, especially in coal mining and Electric Steam Power Plants (PLTU). It is interesting to discuss the three of them and to be a method for identifying environmental damage. Therefore, the authors discuss the three approaches to the oligarchy theory by Jeffry Winters, political corruption by Altidjo Alkostar, and the power relations of actors by Bryant and Bailey. In the discussion of oligarchy, the writer explains the meaning of oligarchy and traces the oligarch by identifying how it works. In discussing corruption, the author explains the Riau-1 PLTU corruption case study that refers to political corruption and the threat of coal corruption based on a study by Indonesia Corruption Watch (ICW). In discussing power relations, the author describes the actors involved and their role in environmental damage and makes methods for identifying environmental damage. The three studies (oligarchy; corruption; power relations) are needed in overcoming the problem of environmental damage that occurs especially in the sector of the coal mining and PLTU.

Keywords: Coal, Corruption, Oligarchy, PLTU, Power Relation



PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam menjadi sumber utama kehidupan di negara Indonesia, tetapi keterlibatan masyarakat Indonesia terhadap kelestarian lingkungan alam perlu dipertanyakan, baik dalam sektor pendidikan, hingga kebijakan. Dalam hal paradigma atau perspektif, Lingkungan menjadi sebuah fokus keilmuan, pembuatan kebijakan, dan kepedulian publik yang meningkat (tidak tertandingi) pada akhir abad kedua puluh (Bryant, 1998).

Menarik untuk membahas lingkungan dalam hal publik (kebijakan publik), terutama sektor ekonomi yang dihadapkan dengan lingkungan (Batu Bara) dan industri (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU). Sifat ekonomi yang eksploitatif untuk kehidupan manusia, membuat lingkungan menjadi korban dan terancam. Pada sektor ekonomi juga dibantu dengan pembuat kebijakan yaitu pemerintahan dan pelaku ekonomi yaitu perusahaan. Menarik untuk dibahas kedua nya, yang menurut penulis meruncing kepada oligarki penguasaan ekonomi bersumber dari kekayaan sumber daya alam, serta korupsi dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya pembuat kebijakan, dan relasi kuasa aktor-aktor yang terlibat dan perannya dalam keterlibatan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Ketiga pembahasan (oligarki; korupsi; relasi kuasa) tersebut akan dielaborasi dalam sub-bab pembahasan. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, penulis menggambarkan sedikit terkait sub-bab pembahasan. Oligarki yang dimaksud menggunakan pendekatan teori Jeffry Winters, dimana dia menulis nya dalam satu buku berjudul *Oligarchy* (2012). Sedangkan pembahasan korupsi menggunakan teori korupsi politik oleh Artidjo Alkostar yang ditulis dalam buku *Korupsi Politik di Negara Modern* (2015). Sedangkan pembahasan relasi kuasa aktor menggunakan teori dari Bryant dan Bailey yang ditulis dalam buku berjudul *Third World Political Ecology* (1997), teori tersebut juga digunakan dalam paper *Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu* oleh Eva Royandi (2018).

Ketiganya perlu dibahas keterlibatan dalam sumber daya alam, dan dijadikan metode atau pendekatan terkait kerusakan alam di Indonesia. Sehingga, pengentasan problematika kerusakan alam dapat dilakukan secara komperhensif, selain dengan menambahkan metode-metode atau pendekatan lainnya.

METODE

Artikel ini dituliskan berdasarkan pendekatan kualitatif dengan mencari bahan pustaka terkait pembahasan ketiga topik yaitu oligarki, korupsi, dan relasi kuasa aktor. Bahan pustaka tersebut diperoleh bersumber dan berdasarkan buku, jurnal, dokumen lembaga, dan internet dengan penulis teridentifikasi.

Sedangkan argumen pendukung diperoleh atas pengalaman penulis yang pernah mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum YLBHI-LBH Bali ditugaskan di PLTU Celukan Bawang, dan mengikuti Sekolah Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tugas Korupsi Politik. Dari kedua pendekatan bahan pustaka, dan argumen pendukung berupa pengalaman, penulis akan membangun argumen terkait Oligarki, Korupsi, Relasi Kuasa atas PLTU dan Batu Bara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melacak Oligarki Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pertambangan Batu Bara

Sumber daya alam bagi suatu negara, bisa menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat atau sebaliknya, menjadi kutukan bagi negara tersebut. Sumber daya alam dieksploitasi, untuk keuntungan material, namun kesejahteraan masyarakat banyak tak kunjung meningkat, alih-alih kesejahteraan meningkat, alam pun rusak, pembangunan berkelanjutan hanya jargon untuk melindungi eksploitasi tiada henti.

Dari hal tersebut kita perlu mengkritisi, jika meminjam istilah Jurgen Habermas



(Budi Hadirman, 2009) dengan teori kritisnya kita perlu me-refleksi-kan diri. Khususnya negara ini. Dimulai dengan bertanya tentang keadaan kita saat ini.

Bagaimana jika kekayaan sumber daya alam yang secara material berlimpah dikuasai segelintir orang? Bagaimana jika kekayaan sumber daya alam tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak? Dan dimana peran pemerintah? Dari refleksi pertanyaan tersebut mengantarkan kepada dua hal besar, yaitu sumber daya alam dikuasai segelintir orang dan sumber daya alam tidak berdampak kepada masyarakat banyak.

Sebelum jauh membahas hal tersebut, alangkah baiknya kita melihat data untuk melihat cerminan kondisi realitas yang ada, walau harus diverifikasi kembali. Dari kondisi realitas tersebut kita bisa me-refleksi-kan diri. Dimulai dengan data penduduk 1% yang memiliki kekayaan berlebih menguasai 46% kekayaan penduduk Indonesia lainnya (Katadata, 2018).

Itu dari hal umum, jika melihat dalam hal khusus, misalnya penguasaan batu bara. Mayoritas penguasaan bisnis batu bara sebesar 60% dikuasai 10 perusahaan besar (Egi, 2018). Hal tersebut menjadi kontradiktif, ketika negara dengan sumber kekayaan alam melimpah tetapi dikuasai segelintir orang.

Dikuasai oleh segelintir orang, yang menurut Jeffrey Winters (2011) merupakan oligarki. Menurutnya oligarki dipahami secara spesifik sebagai politik yang dijalankan oleh kalangan kaya, yakni sang oligark (subjek), dengan tujuan untuk mempertahankan kekayaan mereka secara aktif melalui kekuasaan negara. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Winter menekankan kepada subjek sang oligark dan tujuannya yaitu mencari dan mempertahankan kekayaan melalui kekuasaan negara.

Dari hal tersebut perlu kita bertanya, bagaimana sang oligark bekerja pada kekuasaan negara, dan secara khusus bergerak di sektor pertambangan? Lalu bagaimana melacak para oligark dari perusahaan-perusahaan nya tersebut? Dua pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam artikel ini.

a. **Bekerjanya Oligarki**

Berjalannya suatu negara, dengan syarat terdapatnya pemerintah, dengan memilih sistem demokrasi yang menjadi konsensus bersama masyarakat dalam menjalankan sistem bernegara. Tetapi berjalannya demokrasi, tidak mampu mampu berdampingan dengan oligarki, atau oligarki yang dapat menyesuaikan demokrasi.

Mari kita bertanya, mampu kah demokrasi saat ini menghadapi oligarki? Jauh sebelum kita bertanya, seorang Aristoteles dan Machiavelli telah memikirkan ini, demokrasi dan oligarki. Kedua sarjana politik tersebut berkesimpulan, tidak bisa menyatukan antara demokrasi dan oligarki (Muhammad Ridha, 2020). Berjalannya waktu, oligarki mampu menyesuaikan demokrasi, Orde Baru contohnya.

Diskursus oligarki dilanjutkan oleh seorang Jeffry Winters. Dia membedah bagaimana oligarki berjalan. Teori sumber kekuasaan, teori tersebut digagas oleh Jeffry Winters. Berangkat dari bagaimana memeriksa setiap bentuk kekuasaan yang dimiliki individu dan memperkirakan besaran pengaruhnya. Metode ini digunakan untuk membedakan oligark dan elite.

Mengidentifikasi oligark dan elite setidaknya dengan 5 sumber utama, (1) kekuasaan berdasarkan hak politik, (2) kekuasaan berdasar posisi resmi, (3) kekuasaan koersif, (4) kekuasaan mobilisasional, dan terakhir (5) kekuasaan material. Perbedaan antara elite dan oligark hanya pada nomor 5, yaitu kekuasaan material.

Selain kekuasaan material, terdapat dua hal yang terdapat dalam teori sumber kekayaan, yaitu oligark selalu bersifat individual, dia tidak berwujud perusahaan atau kolektif lainnya, maka diperlukan pengaturan dan pembatasan sumber daya yang bersifat personal.

Dan terakhir, ciri karakteristik oligark selalu konstan sepanjang waktu dan kasus.



Serta yang perlu diingat adalah tidak hanya mencari kekayaan (ketiga hal tadi) tetapi juga mempertahankan kekayaan.

b. Oligarki, Batu Bara, PLTU, dan Cara Melacaknya

Dari mengetahui dan membongkar pola oligarki bergerak. Lalu apa hubungannya dengan Batu Bara dan PLTU? Hubungannya ada pada para oligark mencari dan mempertahankan kekayaan material melalui sumber daya alam, yaitu batu bara dan proses produksi listrik.

Dalam buku Batu Bara dan Ancaman Korupsi (2018) yang ditulis oleh Peneliti ICW, membongkar dampak daripada bisnis batu bara yang menguntungkan para oligark, dan menyebabkan kerugian negara dari sisi perdagangan, pajak, hingga kerusakan alam. Sialnya, keuntungannya dikuasai hanya untuk beberapa perusahaan.

Tetapi ada hal metode yang menarik untuk melacak keberadaan oligark batu bara dan PLTU, yang juga bisa dijadikan untuk gerakan masyarakat kedepannya. Yaitu dengan mengetahui beneficial ownership atau BO (pemilih manfaat utama) dari perusahaan-perusahaan, lalu dicari rekam jejak nya dalam kegiatan politik nasional baik secara langsung atau tidak langsung, dengan atau tanpa kesepakatan aktor pejabat.

Terdapat beberapa instrumen untuk mengetahui nya, mulai dari hukum positif yang mengatur BO, meminta data atas nama keterbukaan informasi publik, mencari dokumen-dokumen lembaga kementerian, atau setidaknya mencari berita-berita terkait sang oligark dengan perusahaannya berkaitan dengan kekuasaan material negara ini.

Hal tersebut bisa dilakukan gerakan-gerakan masyarakat, setidaknya untuk mengkontrol pemerintah. Dan alangkah lebih baik terdapat political will dari pemerintah untuk memberangus para oligark baik skala daerah hingga skala nasional.

Pola Korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pertambangan Batu Bara

Korupsi menjadi hantu (hal yang menakutkan) bagi negara ini, semenjak berdiri nya negara ini, korupsi selalu menjadi problematika di setiap rezim pemerintahan. Dari rezim orde baru (demokrasi terpimpin), orde baru (demokrasi liberal pasar bebas), hingga pasca reformasi.

Korupsi selingkuh dengan setiap rezim, perlakuannya seperti suap, mark-up, izin, proyek, bisnis, politik praktis, dan masih banyak lainnya. Korbannya? Selain masyarakat terdapat sumber daya alam (ekologi), kedua itu merupakan objek dari korupsi. Subjek nya, mulai dari kalangan elite atas hingga bawah yang menghasilkan oligarki, baik dari dalam institusi pemerintahan, hingga dari luar berupa orang-orang binis, atau bahkan keduanya menjadi satu.

Lalu pertanyaan seberapa berdampak korupsi terhadap objek tersebut, khususnya sumber daya alam. Tentu dalam hal ini berlaku sebab-akibat, sumber daya alam jika dieksploitasi dengan pandangan hanya mencari keuntungan oleh para calon koruptor, maka sumber daya alam akan habis dan rusak.

Salah satu nya batu bara, yang menjadi sumber utama penggerak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dari hal tersebut, kita bertanya, bagaimana batu bara dan PLTU dijadikan objek korupsi oleh para koruptor? Bagaimana pola korupsi nya? Dan siapa aktor-aktor nya?

Untuk menjelaskannya, penulis ingin memberikan dengan pendekatan pada kasus korupsi PLTU Riau-1 dan studi pustaka dari buku Batu Bara dan Ancaman Korupsi yang ditulis oleh peneliti ICW tahun 2018.



a. Pola Korupsi PLTU Riau

Mekanisme kerjasama antara PLN dan Pembangkit Listrik Swasta atau Independent Power Producer (IIP) menyebabkan rawan kecurangan antara Pemerintah dan Swasta. Bentuk kerjasamanya dengan melaksanakan kerjasama jual beli listrik dalam skema kontrak Power Purchase Agreement (PPA).

Bentuk skema kontrak PPA, PLN berkewajiban membeli daya beli listrik dari pembangkit listrik swasta atau IIP. Isi kontrak berlaku rata-rata hingga 30 tahun bagi semua jenis sumber listrik. Dan menggunakan model take or pay, dimana PLN wajib membayar dan menyerap 80% kapasitas IIP, jika tidak PLN dikenai denda (Alfian dan Gina, 2018).

Hal tersebut menjadi kenyataan pada kasus PLTU Riau-1. Celah tersebut dimanfaatkan antara DPR, PLN (pemerintah), dan Swasta pada saat proyek PLTU Riau-1 dimulai. Pihak Swasta sebagai subjek memberikan suap uang kepada DPR, untuk dipertemukan dengan PLN. Aktor-aktornya antara lain Eni Maulani, sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Idrus Marham sebagai DPR dan Sekjen Partai Golkar, Johannes B. Kotjo sebagai swasta, dan dari PT. PLN (Tempo, 2019).

Aktor-aktor tersebut benar-benar menggambarkan skema korupsi politik (dalam bahasa lain lingkaran setan korupsi). Korupsi Politik dijalankan secara terencana dari aktor-aktornya, mulai swasta sebagai pemicu, aktor sentral merupakan DPR, dan aktor pelaksana ialah PLN.

Korupsi Politik sendiri menurut Altidjo Alkostar merupakan spesies dari genus korupsi umum dan korupsi politik top hat crime adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi (Altidjo, 2015).

b. Ancaman Korupsi Batu Bara

Selain mekanisme kerja swasta dan pemerintah di sektor pembangkit listrik. Ancaman juga datang dari pengelolaan tambang batu bara. Dari hulu hingga hilir, dari perizinan hingga penjualan. Izin yang diberikan dibuktikan tidak efektif dalam hal penegakan hukum untuk sektor pertambangan. Perusahaan tambang yang membiarkan lombang bekas tambang adalah buktinya.

Tetapi dalam tulisan ini tidak akan menyorot perizinan terlalu dalam. Tulisan ini akan membedah berdasarkan Buku Batu Bara dan Ancaman Korupsi (2018). Pola yang menjadi ancaman, terjadi diantaranya kegiatan ekspor yang tidak jelas dan permasalahan pajak.

Dimulai dari adanya perbedaan data perdagangan batu bara dari Kementerian ESDM dan data Badan Pusat Statistik (BPS). Lalu dikomparasikan dengan data pembelian oleh negara pengimpor batu bara. Terdapat ketidaksamaan, dan menunjukan data pembelian negara pengimpor rendah dibanding data dari negara Indonesia, hal tersebut membuat kerugian negara sektor ekspor pertambangan (Egi, 2018).

Kemudian transaksi ekspor dari perusahaan tambang batu bara yang tidak dilaporkan secara utuh. Hal tersebut disinyalir sebagai cara untuk menghindari pajak yang tinggi. Dan berakibat pada kerugian negara serta rusaknya sumber daya alam yang terus dieksploitasi (Egi, 2018).

Kedua pola tersebut, ketidaksamaan data penjualan dan penghindaran pajak, jelas merugikan negara pengeskor dan yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan tersebut. Jika kondisi tersebut tidak terjadi, logikanya data penjualan ekspor batu bara sama dengan apa yang terjadi sehingga pajak yang dibayarkan juga sesuai dengan apa yang diekspor.

Hal tersebut membuat pertambangan batu bara, mulai dari izin hingga penjualan, hingga pengolahan menjadi listrik, benar-benar dijadikan objek dari tangan-tangan (perusahaan dan pemerintah) yang salah. Jika pengelolaan baik, dan ditunjukkan



untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan teknologi baik energi terbarukan, tidak mengapa. Tetapi oligarki penguasa tambang yang muncul, baik dari sektor swasta dan negara.

Relasi Kuasa Aktor dalam Problematika Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Batu Bara

Tahun ke tahun, bencana ekologi terus meningkat, disebabkan penurunan kualitas sumber daya alam di Indonesia (Adi, 2020). Hal tersebut berdampak pada masa depan kehidupan makhluk hidup di bumi. Kerusakan demi kerusakan terjadi, hal tersebut tidak terjadi begitu saja, terdapat sebab kenapa permasalahan terus terjadi, eksploitasi atas dasar antroposentris dalam bahasa filsafat (memandang kebutuhan manusia).

Salah satu diantara banyaknya problematika, dicatat oleh WALHI dalam Black Book (2018). Buku tersebut mencatat praktek-praktek kotor aktor industri sawit, bukan hanya masyarakat yang terdampak namun juga alam khususnya hutan dan flora fauna seisinya.

Selain permasalahan sawit, terdapat juga Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tidak kalah menariknya. Aktor-aktor yang terlibat diantaranya Pemerintah (Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah), Legislatif (DPR), Swasta (Perusahaan Asing dan Lokal), Organisasi Lingkungan atau LSM (Skala Internasional, Nasional, dan Lokal) dan Masyarakat Setempat (Egi, 2018, Eva, 2018).

Dari aktor-aktor tersebut, menarik untuk dianalisis relasi kuasa dan perannya dalam problematika lingkungan hidup. Analisis aktor tersebut menggunakan metode Bryant dan Bailey dalam bukunya Third World Political Ecology (1997).

Menurutnya relasi kuasa dapat terjadi dalam bentuk konflik, kerjasama, dan perlawanan dalam memperoleh manfaat sumber daya alam. Selain hal tersebut, ditambah faktor modal dan peran aktor tersebut (Adi, 2020). Sehingga terlihat aktor yang memiliki kekuasaan lebih dapat mempengaruhi aktor lain dalam mengontrol, mempertahankan, memanfaatkan sumber daya alam (Eva, 2018).

a. Aktor Relasi Kuasa

a) Aktor Pemerintah

Pemerintah yang memiliki segala sumber daya baik modal material maupun legitimasi masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Pemerintah menjadi sosok sentral dalam hal ini. Dilapisi oleh DPR yang secara normatif mengawasi pemerintah, tapi pada kenyataannya bisa dilihat sendiri.

Sosok sentral disini artinya dia menghubungkan antara legislatif, swasta, LSM, serta masyarakat. Tujuan akhirnya secara normatif adalah menyejahterakan masyarakat. Tetapi tidak dengan kenyataan, realitas yang ada. Pemerintah sebagai pembuat izin, seringkali disuap oleh Swasta. Bagaimana terkait dengan sumber daya alam? Selalu ada pemerintah dalam hal kerusakan alam. Lobang Tambang hingga izin Amdal PLTU yang tidak tepat adalah realitas kondisi kinerja pemerintah.

b) Aktor Swasta

Swasta atau perusahaan, merupakan entitas yang wajar keterlibatannya dalam ekonomi berbasis pasar. Swasta menjalankan proyek-proyek yang diagendakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Lingkupnya dari skala kecil dikenal UMKM, hingga internasional dikenal Multi Nasional Company.

Dalam menjalankan proyek-proyek untuk mencari untung tersebut, terkadang permasalahan terjadi. Swasta menjadi tokoh sentral, karena memiliki modal material, dibanding (pegawai) pemerintah, serta DPR yang menjadi lupa untuk mengontrol pemerintah. PLTU Riau-1 contohnya (Tempo, 2019). Dimana Sumber Daya Alam menjadi objek korupsi, yang dimulai dan tokoh sentralnya



merupakan swasta.

c) Aktor LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat menjadi unsur penting dalam penyambung aspirasi masyarakat untuk mengadvokasi dalam problematika lingkungan. Walaupun jenisnya banyak, dari yang pragmatis hingga kritis. Tetapi setidaknya, jika masyarakat berkumpul menjadi satu, meningkatkan bargaining position di mata pemerintah.

Selain itu, LSM juga melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat, dalam menjalankan program LSM sesuai dengan tujuan atau visinya. Selain melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat, LSM juga melakukan riset terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi (Adi, 2020). Berikut LSM yang fokus di permasalahan lingkungan dari skala internasional hingga lokal, seperti Greenpeace, Walhi, Jatam, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH).

d) Aktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor kunci, secara normatif dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, tetapi pada kenyataannya oligarki lah yang menentukan (Geger, 2020). Alih-alih bicara pemerintah, swasta, LSM, dan teman-temannya, masyarakat lah yang berhadapan dan merasakan langsung dengan kerusakan lingkungan.

Korban meninggal di bekas lobang tambang, asap kotor disekitaran lingkungan PLTU, nelayan melaut jauh karena PLTU, dan masih banyak lagi. Sementara, kuasa masyarakat tidak ada, dari legitimasi (secara realitas), dan modal material (jika dibandingkan pemerintah dan swasta). Ketimpangan ini menyebabkan pembangunan yang tidak adil, sejak dalam perencanaan hingga hasil pembangunan.

b. Sebuah Metode Memetakan Relasi Kuasa Aktor

Dari Bryant dan Bailey menuju pendekatan kasus, dan analisis relasi kuasa aktor-aktor dari Pemerintah (Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Desa), Legislatif (DPR), Swasta (Perusahaan Nasional, Multi Nasional Company), LSM (Internasional, Nasional, Lokal), Masyarakat. Hal tersebut bisa dijadikan metode atau pendekatan untuk penelitian terkait kerusakan lingkungan.

Setidaknya pendekatan aktor atas relasi kuasa untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi, nantinya jatuh pada kesimpulan teori kekuasaan, jika menurut Marx penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi kekuasaan, Weber atas kuasa kharisma, Foucault atas relasi kekuasaan yang beragam dan tersebar, mempunyai ruang lingkup strategis, (Umar, 2017) atau pendekatan kekuasaan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Bersumber dari pembahasan mengenai batu bara dan PLTU dapat dijadikan topik pembahasan terkait oligarki, korupsi, dan relasi kuasa. Oligarki sebagai entitas kumpulan manusia yang mempunyai material dan kepemilikan berlebih menunjukkan eksistensinya dengan data jurang tajam kemiskinan antara oligarki dan masyarakat banyak di Indonesia, dan menunjukkan keberadaannya dengan kepemilikan perusahaan batu bara dan PLTU dengan cara bekerja secara politis dengan pembuatan kebijakan dan legislatif.

Hal tersebut berdampak pada terjadinya korupsi sejak perencanaan hingga, pada tahap penjualan hasil pertambangan batu bara dan listrik. Korupsi yang terstruktur dan melibatkan aktor-aktor dari swasta (perusahaan), pemerintah (kementerian, PLN), legislatif (DPR), hingga Partai Politik. Aktivitas tersebut dinamakan dengan korupsi politik, yang melibatkan aktor-aktor besar, disebut juga lingkaran setan korupsi.



Mengidentifikasinya keduanya antara oligarki dan korupsi memerlukan relasi kuasa aktor yang terjadi dalam kasus kerusakan alam, sehingga nantinya dapat dipetakan aktor-aktor yang terlibat serta perannya dalam kerusakan alam tersebut. Dan mengetahui faktor apa yang menggerakkan aktor-aktor tersebut terlibat didalam eksploitasi alam yang menyebabkan kerusakan alam.

Pernyataan penutup harus berisi ringkasan dan saran. Ringkasan tersebut harus mencontohkan jawaban yang diberikan untuk hipotesis dan / atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Ringkasan tidak boleh berisi pengulangan hasil penelitian dan diskusi, dan sebagai gantinya harus berisi ringkasan hasil penelitian dan temuan seperti yang diharapkan dalam tujuan penelitian atau hipotesis. Saran harus menyajikan hal-hal yang selanjutnya akan dilakukan dalam kaitannya dengan konsep penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Altidjo Alkostar. 2015. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Adi Fauzanto. (2020). Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Problematika Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Momentum Vol. 9(1)*.
- Adi Fauzanto. (2020). Kondisi Masyarakat Desa Pengulon Celukan Bawang Menghadapi Kasus PLTU Celukan Menggunakan Analisis Relasi Kuasa. *Jurnal Socia Vol. 17(1)*.
- Bryant & Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. London & Newyork: Routledge Press
- Budi Hadirman. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Egi Primayogha, dkk. 2018. *Batu Bara dan Ancaman Korupsi*. Malang: Intrans Press
- Jeffrey A. Winters. 2011. *Oligarchy*. New York: Cambrige University Press.
- Muhammad Ridha, dkk. 2020. *Oligarki: Teori dan Kritik*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Eva Royandi, dkk. (2018). Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP Vol. 8(2)*.
- Raymond Bryant. (1998). Power, Knowledge, and Political Ecology in The Third World: A Review. *Jurnal Progress in Physical Geography Vol. 22(1)*.
- Umar Kamahi. (2017). Teori Kekuasaan Michel Focault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah Vol. 3(1)*.
- Dokumen Tinjauan Lingkung Hidup WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) 2018.
- Alfian dan Gina. 2018. "Membangun Infrastruktur Untuk Siapa?.." Dari: <https://indoprogress.com/2018/10/membangun-infrastruktur-untuk-siapa/> Diakses: 15 Mei 2020.
- Geger Riyanto. 2020. "Para Filsuf Cuma Bisa Menafsirkan Dunia, Elite Oligarki yang Menentukannya." Dari: <https://indoprogress.com/2020/05/para-filsuf-cuma-bisa-menafsirkan-dunia-elite-oligarki-yang-menentukannya> Diakses 2 Juni 2020
- Katadata. 2018. "1 Orang Terkaya Indonesia Menguasai 46 Persen Kekayaan Penduduk". Dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/30/1-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk> Diakses: 30 Mei 2020



Tempo. 2019. "PLTU Riau-1". Dari: <https://www.tempo.co/tag/pltu-riau1> Diakses: 1 Juni 2020